

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANGANAN CEPAT MEDIS DAN KESEHATAN MASYARAKAT COVID-19 DI RSHD KOTA BENGKULU

Kahar Hakim¹ Jatmiko Yogopriyatno²

^{1,2} Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science, University of Bengkulu

¹ E-mail: drs.kahar.msi@gmail.com ² E-mail: jjogop@unib.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received: March 01, 22
 Revised: March 08, 22
 Accepted: March 16, 22
 Available online: April 27, 22

KEYWORDS

Kebijakan Penanganan Cepat Medis, Covid-19 dan RSHD Kota Bengkulu

This is an open access article under the
 CC-BY-SA license



ABSTRAK

Dalam penelitian ini, konsep evaluasi pelaksanaan yang digunakan adalah konsep yang berasal dari model implementasi George C. Edwards. Sedangkan konsep pelayanan yang digunakan berasal dari Kotler. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan bersifat Eksploratif. Sampel penelitian ini berjumlah 32 orang berdasarkan derajat kesalahan 5%. Statistik uji yang digunakan adalah Uji korelasi Kendal Tau merupakan statistik non-parametrik yang digunakan untuk mendapatkan kuatnya hubungan yang berasal dari populasi yang sama. Variabel Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dilaksanakan secara baik di RSHD Kota Bengkulu. Secara kumulatif mayoritas responden merasakan hasil kepuasan yang relatif tinggi terhadap pelayanan publik sektor kesehatan di RSHD Kota Bengkulu yang artinya pelayanan yang diberikan di RSHD Kota Bengkulu bernilai tinggi atau memuaskan masyarakat. Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 berpengaruh terhadap Pelayanan Publik di RSHD Kota Bengkulu. Hal ini dapat dibuktikan juga dengan perhitungan tabulasi yang dinyatakan bahwa nilai z hitung $< z$ tabel dengan dk sebanyak 5%. Yaitu $0,462 < 0,3264$ yang berarti bahwa tolak H_0 dan terima H_a . Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dengan Pelayanan Publik di RSHD Kota Bengkulu perlu dioptimalkan lagi, dengan cara sosialisasi peraturan ini dan penerapan reward and punishment terhadap petugas RSHD Kota Bengkulu yang berprestasi maupun yang melakukan pelanggaran.

ABSTRACT

In this study, the implementation evaluation concept used is a concept derived from George C. Edwards' implementation model. While the concept of service used comes from Kotler. This research uses quantitative and exploratory research methods. The sample of this study amounted to 32 people based on the degree of error 5%. The test statistic used is the Kendal Tau correlation test, which is a non-parametric statistic used to obtain the strength of the relationship from the same population. The Variable Implementation of the Covid-19 Medical Rapid Handling and Public Health Policy was carried out well at the Bengkulu City Hospital. Cumulatively, the majority of respondents feel the results of relatively high satisfaction with public services in the health sector at the Bengkulu City Hospital, which means that the services provided at the Bengkulu City Hospital are of high value or satisfy the community. The implementation of the Covid-19 Rapid Medical and Public Health Handling Policy has an effect on public services at the Bengkulu City Hospital. This can be proven also by the tabulation calculation which states that the value of z count $<$ z table with dk as much as 5%. That is $0.462 < 0.3264$ which means that reject H_0 and accept H_a . The implementation of the Covid-19 Rapid Medical and Public Health Handling Policy with Public Services at the Bengkulu City Hospital needs to be optimized again, by socializing this regulation and applying rewards and punishments to Bengkulu City RSHD officers who excel and who violate.

PENDAHULUAN

Coronavirus-19 (COVID) telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO (WHO,2020). *Coronavirus* adalah zoonosis atau virus yang ditularkan antara hewan dan manusia. Virus dan penyakit ini diketahui berawal di kota Wuhan, Cina sejak Desember 2019. Per tanggal 21 Maret 2020, jumlah kasus penyakit ini mencapai angka 275,469 jiwa yang tersebar di 166 negara, termasuk Indonesia.

Sebagai bentuk konkret untuk merespon hal tersebut pemerintah Indonesia dengan sigap mengambil langkah-langkah strategis secara gotong-royong melalui penyiapan dan penguatan kapasitas sumber daya kesehatan baik di rumah sakit, laboratorium, dan fasilitas kesehatan lainnya. Adapun bentuk konkret kebijakan yang diambil pemerintah yakni dengan menerbitkan Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Pedoman ini dibuat guna memberikan panduan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat umum dalam mencegah dan menangani kasus COVID-19.

Tenaga medis di semua level dan semua tipe institusi medis merupakan garda terdepan, mereka bertugas memastikan pasien-pasien dapat tertangani dengan baik namun juga tetap harus memikirkan keselamatan nyawa mereka. Hingga 12 April 2020 (<https://www.okezone.com>), sebanyak 31 tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 meninggal dunia. Mereka gugur saat menjalankan sumpah profesinya, menyelamatkan nyawa manusia tanpa pandang bulu. Fakta miris memang. Mereka bertaruh nyawa demi kesembuhan manusia lain, sementara itu alat pelindung

diri (APD) yang digunakan tak layak dan tak memadai jumlahnya di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang.

Dalam laporan Kementerian Kesehatan RI, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Bambang Wibowo mengungkapkan, kebutuhan APD sangat tinggi di tengah pandemi tapi stok terbatas. Lalu, kalau alat pelindungnya saja terbatas, dengan apa para tenaga medis ini berlindung? Makanya, jangan heran kalau banyak dari mereka yang menggunakan jas hujan bahkan galon.

Penyebaran kasus virus corona (Covid-19) di Indonesia menjangkit di seluruh provinsi tidak terkecuali di Provinsi Bengkulu yang sebelumnya telah berhasil mempertahankan zona hijau sebagai satu satunya provinsi di pulau Sumatera yang bebas dari virus corona (Covid-19) selama kurang lebih tiga bulan. Status ini kemudian berubah menjadi zona merah pasca Gubernur Bengkulu mengumumkan melalui konferensi pers yang digelar di ruang media center Kantor Gubernur Bengkulu di dampingi oleh Direktur RSUD M.Yunus Bengkulu, beserta tim penanganan covid-19 Provinsi Bengkulu, pada hari Selasa 31 maret 2020, dan bertambah menjadi bahwa jumlah pasien yang positif terjangkit virus corona atau Covid-19 di Bengkulu bertambah menjadi 4 orang Pasien Positif Corona di Bengkulu dengan zona merah berada di kota Bengkulu.

Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan pelayanan publik sector kesehatan mencegah dan menangani kasus COVID-19 di RSHD Kota Bengkulu adalah bagaimana praktek-praktek dan mekanisme yang

dilakukan aparatur pelaksana (*street level bureaucrat*) yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sebagai kliennya. Mekanisme tersebut seperti yang dikatakan Lipsky (2010:83) bahwa: "pola tindakan (*pattern of practice*) rutinitas dan simplifikasi". Dengan demikian perilaku/kebiasaan yang dilakukan pelaksana pelayanan publik adalah tindakan untuk melaksanakan, menyederhanakan, menyesuaikan, mempercepat prosedur, bahkan memudahkan pekerjaan dan tugas kesehariannya (*Coping Behavior*) sebagai pelaksana kebijakan publik.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di RSHD Kota Bengkulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah kuantitatif dan bersifat Eksploratif.

Populasi penelitian ini adalah petugas kesehatan (PNS, Honor, TKS, beserta sekretaris desa yang ada), sedangkan sampel penelitian ini perwakilan populasi petugas kesehatan (PNS, Honor, TKS, beserta sekretaris desa yang ada), dan masyarakat yang turut mendapat pelayanan Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di RSHD Kota Bengkulu berdasarkan derajat kesalahan 5% (Isaac Michael dalam Sugiyono, 2015:131). Statistik uji yang digunakan adalah Uji korelasi Kendal Tau merupakan statistik non-parametrik yang digunakan untuk mendapatkan kuatnya hubungan yang berasal dari populasi yang sama. Statistik korelasi Uji korelasi Kendal Tau digunakan karena skala yang digunakan adalah skala rangking /ordinal dan sampel penelitian adalah lebih dari sebelas orang (Sugiyono;20115;65). Setelah dilakukan uji korelasi dilakukan uji z

untuk mengetahui kuatnya pengaruh antar variabel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di RSHD Kota Bengkulu dilihat dari dimensi evaluasi pelaksanaan dan pelayanan yang akan dibahas secara lengkap di sub bab berikut ini :

1. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

Berdasarkan hasil kuisioner terhadap indikator Komunikasi terhadap 32 orang sampel diketahui bahwa indikator komunikasi mendapatkan skor 126 dengan masuk ke dalam kategori tinggi. Dengan kategori tersebut diketahui bahwa tingkat komunikasi dalam aspek kejelasan, akurasi dan konsistensi di RSHD Kota Bengkulu menunjukkan nilai tinggi/baik. Indikator Komunikasi merupakan hal penting bagi terwujudnya sistem kerja dan pola kerja yang kondusif (Edward, 221: 1980). Jika komunikasi sudah benar terwujud maka aspek ini tentunya akan mempengaruhi faktor-faktor lain secara simultan.

Berdasarkan hasil kuisioner terhadap indikator sumber daya terhadap 32 orang sampel diketahui bahwa indikator komunikasi mendapatkan skor 127 dengan masuk kedalam kategori tinggi. Dengan kategori tersebut diketahui bahwa Sumberdaya di Kantor RSHD Kota Bengkulu menunjukkan nilai tinggi/baik. Indikator Sumber daya merupakan hal penting bagi terwujudnya sistem kerja dan pola kerja yang kondusif (Edward,227:1980). Hal ini dikarenakan sumberdaya material, keuangan, personal, dan teknologi merupakan seperangkat faktor laten yang menjamin keberlangsungan suatu implementasi kebijakan. Selanjutnya, berdasarkan hasil kuisioner terhadap indikator disposisi terhadap 32 orang

sampel diketahui bahwa indikator komunikasi mendapatkan skor 123 dengan masuk ke dalam kategori tinggi. Dengan kategori tersebut diketahui bahwa tingkat disposisi di RSHD Kota Bengkulu menunjukkan kategori nilai tinggi/baik. Indikator disposisi merupakan kecenderungan perilaku aktor-aktor pelaksana di RSHD Kota Bengkulu. Jika Disposisi para aparatur pelaksana kebijakan sudah baik maka kebijakan akan dilaksanakan secara konsisten dan persisten karena komitmen yang tinggi dari pelaksana di RSHD Kota Bengkulu. Indikator terakhir yaitu struktur birokrasi di RSHD Kota Bengkulu menunjukkan skor sebesar 116. Skor ini menunjukkan kategori tinggi. Dengan demikian struktur birokrasi di RSHD Kota Bengkulu sudah baik dalam menunjang

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di RSHD Kota Bengkulu.

Secara kumulatif item-item indikator dalam variabel evaluasi pelaksanaan tersebut menunjukkan skor sebesar 487. Jika skor tersebut diinterpolasi dengan cara dibagi 4 maka nilai mean yang diperoleh adalah 121,75. Skor ini menunjukkan kategori tinggi/baik dan diartikan bahwa variabel ini menunjukkan variabel Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dilaksanakan secara baik di RSHD Kota Bengkulu.

Hasil analisis persentase yang dilakukan pada skor yang diperoleh pada 32 orang sample menunjukkan frekuensi dan persentase seperti yang disajikan pada tabel berikut;

Tabel.1 Persentase dan Frekuensi Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	12.00	2	6.3	6.3
	13.00	3	9.4	15.6
	14.00	5	15.6	31.3
	15.00	8	25.0	56.3
	16.00	6	18.8	75.0
	17.00	6	18.8	93.8
	18.00	2	6.3	100.0
Total	32		100.0	

Berdasarkan data sampel diketahui bahwa terdapat 8 responden dengan skor jawaban sebesar 15 artinya frekuensi yang diperoleh adalah delapan kali dengan persentase 25%. Selanjutnya terdapat dua frekuensi 6 terhadap skor jawaban 16 dan 17 dengan Valid persentase masing-masing sebesar 18,8%. Selanjutnya 5 responden menjawab dengan skore masing-masing sebesar 9,4 %, . Terakhir, masing-masing

4 responden yang menjawab dengan skor sebesar 18 dan 12 yaitu sebesar 6,3 % .

2. Pelayanan Publik

Dalam penelitian ini, indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik pada RSHD Kota Bengkulu adalah berbagai dimensi yaitu keandalan (*reliability*), koresponsifan (*responsiveness*), keyakinan

(*confidence*), empati (*emphaty*) dan berwujud (*tangible*). Hasil penelitian tersebut berasal dari Data Primer yaitu Kuisisioner serta data sekunder yaitu berupa interview dengan beberapa informan, hasil observasi di lapangan

maupun telaah dokumen-dokumen terkait.

Tabel 2. Frekuensi dan Persentasi Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat RSHD Kota Bengkulu

Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 16.00	2	6.3	6.3	6.3
17.00	1	3.1	3.1	9.4
18.00	5	15.6	15.6	25.0
19.00	9	28.1	28.1	53.1
20.00	6	18.8	18.8	71.9
21.00	7	21.9	21.9	93.8
22.00	1	3.1	3.1	96.9
24.00	1	3.1	3.1	100.0
Total	32	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa 30 orang responden memberikan informasi bahwa kualitas pelayanan di RSHD Kota Bengkulu memiliki kriteria tinggi dan sangat tinggi sebanyak 30 frekuensi dan hanya 2 orang yang mendapatkan frekuensi sedang/cukup. Secara kumulatif tabel tersebut menjelaskan bahwa mayoritas responden merasakan hasil kepuasan yang relatif tinggi terhadap pelayanan publik di RSHD Kota Bengkulu.

3. Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di RSHD Kota Bengkulu

Hipotesis dalam penelitian ini adalah Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 berpengaruh terhadap Kualitas Pelayanan Publik di RSHD Kota Bengkulu.

Uji statistik Kendal Tau dilakukan atas beberapa faktor prasyarat yaitu :

1. Sebaran data tidak mengacu pada sebaran normalitas
2. Jenis data dalam penelitian bersifat ordinal

Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS versi 23.00 diketahui hasil perhitungan data hasil Uji Korelasi Tau Kendal memperlihatkan hubungan koefisien korelasi maksimal yaitu 1(1.00). Melalui uji dua pihak diketahui bahwa besarnya hubungan dua variabel tersebut adalah 0,477. Secara interpretatif nilai tau_b sebesar 0,477 menunjukkan hubungan yang sedang/cukup antara variabel Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dengan Pelayanan Publik di Kantor RSHD Kota Bengkulu.

Setelah dilakukan uji hubungan maka dilakukan uji pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Cepat Medis

dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dengan Kualitas Pelayanan Publik di RSHD Kota Bengkulu. Uji yang digunakan adalah uji Z dengan pola Run

test. Hasil uji Z dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel.3. Hasil Uji Z pengaruh Dua Variabel

Runs Test		
	Ev.Pelaksanaan	Plyn.Sekt.Publik
Test Value ^a	15.00	19.00
Cases < Test Value	10	8
Cases >= Test Value	22	24
Total Cases	32	32
Number of Runs	17	12
Z	.736	-.242
Asymp. Sig. (2-tailed)	.462	.809

a. Median

Berdasarkan hasil uji Z diketahui bahwa nilai test pada beberapa kasus pada Evaluasi pelaksanaan dengan nilai tengah 15 adalah sebanyak 10 kasus lebih kecil dari nilai yang ada dan 22 kasus lebih besar dari pada nilai tengah bobot skor. Selanjutnya Pelayanan sektor publik memiliki nilai test 19 dengan asumsi 8 frekuensi lebih kecil dari nilai test. Berdasarkan asumsi tersebut jumlah penyimpang terjadi adalah 17 dan 12. Pengaruh X terhadap Y ditunjukkan oleh nilai Z yaitu 0,736 dan karena pelayanan sektor publik mendapat nilai -242 maka diasumsikan nilai uji yang dilakukan adalah benar. Hal ini karena nilai negatif variabel dependent(terikat) tidak dapat mempengaruhi variabel independent secara simultan dan interaktif.

Berdasarkan hasil uji Z diketahui nilai Z hitung adalah sebesar 0,462 atau lebih besar dari 0,05 dengan demikian hipotesis nol(H_0) ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Cepat Medis

dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 berpengaruh terhadap Pelayanan Publik di RSHD Kota Bengkulu. Hal ini dapat dibuktikan juga dengan perhitungan tabulasi yang dinyatakan bahwa nilai z hitung < z tabel dengan dk sebanyak 5%. Yaitu $0,462 < 0,3264$ yang berarti bahwa tolak H_0 dan terima H_a .

PENUTUP

Hasil dan pembahasan penelitian yang telah diraikan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa :

1. Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di RSHD Kota Bengkulu dilihat dari 4 (empat) indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menunjukkan bahwa tiap-tiap indikator tersebut bernilai tinggi. Sehingga secara kumulatif item-item indikator dalam variabel evaluasi pelaksanaan tersebut menunjukkan skor sebesar 487. Jika skor tersebut diinterpolasi dengan cara dibagi 4

maka nilai mean yang diperoleh adalah 121,75. Skor ini menunjukkan kategori tinggi/baik dan diartikan bahwa variabel ini menunjukkan variabel Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dilaksanakan secara baik di RSHD Kota Bengkulu.

2. Kualitas pelayanan publik Sektor kesehatan di RSHD Kota Bengkulu Kabupaten Kaur dinilai berdasarkan 5 (lima) indikator yaitu keandalan (*reliability*), koresponsifan (*responsiveness*), keyakinan (*confidence*), empati (*emphaty*) dan berwujud (*tangible*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kumulatif mayoritas responden merasakan hasil kepuasan yang relatif tinggi terhadap pelayanan publik di RSHD Kota Bengkulu yang artinya pelayanan yang diberikan di RSHD Kota Bengkulu bernilai tinggi atau memuaskan masyarakat.
3. Berdasarkan hasil uji Z diketahui nilai Z hitung adalah sebesar 0,462 atau lebih besar dari 0,05 dengan demikian hipotesis nol (H_0) ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 berpengaruh terhadap Pelayanan Publik di RSHD Kota Bengkulu. Hal ini dapat dibuktikan juga dengan perhitungan tabulasi yang dinyatakan bahwa nilai z hitung $<$ z tabel dengan dk sebanyak 5%. Yaitu $0,462 < 0,3264$ yang berarti bahwa tolak H_0 dan terima H_a .

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diolah maka hubungan koefisien korelasi maksimal yaitu 1(1.00). Melalui uji dua pihak diketahui bahwa besarnya hubungan dua variabel tersebut adalah 0,477 secara interpretatif nilai tau_b sebesar 0,477 menunjukkan hubungan yang sedang/

Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dengan Pelayanan Publik di Kantor RSHD Kota Bengkulu. Oleh karena itu Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di RSHD Kota Bengkulu perlu dioptimalkan lagi, dengan cara sosialisasi dan penerapan *reward and punishment* terhadap pegawai RSHD Kota Bengkulu yang berprestasi maupun yang melakukan pelanggaran.

REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin. 2017. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Desiase 2019 (Covid-19)
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Desiase 2019 (Covid-19)

Lipsky, Michael. 2010. *Street Level Bureaucracy: Dilemmas of The Individual in Public Service*. Russel Sage Foundation. 112 64 th Street, New York.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*. Penerbit Alfabeta Bandung.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik